

DAFTAR PUSTAKA

- Ateng Syafrudin. *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Bandung. Universitas Parahyangan, 2000. Hlm 22
- Aminah, Roikan, *pengantar metode penelitian kualitatif Ilmu Politik*, Prenamedia Group, Jakarta timur, 2019, hal.64.
- Dwiyanto, Agus, et.al, 2003, *Reformasi Tata Pemerintahan & Otonomi Daerah, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan*, UGM, hal. 61
- Dean G. Pruitt & Jeffrey Z Rubin, 2004, *Teori Konflik Sosial (terjemahan)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Social Conflict: Escalation, Stalemate and Settlement, Mc. Graw-Hill Inc, hal. 26
- Heinrich Triepel, dalam Sodjuangon Situmorang, *Model Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota*. Disertasi, PPS Fisip UI, Jakarta. 2002. hlm. 104.
- Indrati, Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta. Kanisius. 2007 Hlm 67
- J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hal 68
- Luthans, Fred, 2005. *Perilaku Organisasi, Edisi Sepuluh*, Diterjemahkan oleh : Vivin Andhika Yuwono; Shekar Purwanti; Th.Arie Prabawati; dan Winong Rosari. Penerbit Andi, Yogyakarta
- Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, 1992, dalam Agus Salim, 2001, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial: Buku Sumber Untuk*

Penelitian Kualitatif (edisi kedua, Agustus 2006), Tiara Wacana, Yogyakarta, hal.22 23

Ramlan Surbakti, 1992, *Memahami Ilmu Politik* (cetakan keempat: September 1999), PT Grasindo, Jakarta, hal. 149

Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta. RajaGrafindo Persada, 2008. Hlm 110.

Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hal.99.

Syamsul Hadi, et.al., 2007, *Disintegrasi Pasca Orde Baru: Negara, Konflik lokal dan Dinamika Internasional*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hal. 272

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2005. Hlm 280 - 288

Zuhro, Siti R, et.al, 2004, *Konflik & Kerjasama Antar Daerah: Studi Pengelolaan Hubungan Kewenangan Daerah dan Antar Daerah di Jawa Timur, Bangka, Belitung, dan Kalimantan Timur*, Pusat Penelitian Politik-LIPI, Jakarta, hal. 163

Jurnal

Ira permatasari, jurnal konflik perbatasan pemerintah daerah(studi kasus perebutan gunung kelud antara Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri

Jembris mou. Konflik wilayah antara Kabupaten Halmahera Utara dengan
Kabupaten Halmahera Barat. (jurnal ilmu politik, vol. 2, no 6, 2015)

Nanang Kristiyono, Konflik Dalam Penegasan Batas Daerah antara Kota
Magelang dengan Kabupaten Magelang

Sumber lainnya

Faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa wilayah,
http://www.academia.edu/9346557/Faktor_Yang_Menyebabkan_Terjadinya_Sengketa_Wilayah

<https://pih.kemlu.go.id/files/UU0232014.pdf>.

Permendagri Nomor 45 tahun 2011 tentang wilayah administrasi Pulau
Kakabia

Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah

Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang *Pembagian Urusan Pemerintahan*

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten
Buton Selatan

Undang-undang republik Indonesia nomor 1 tahun 2014 tentang
pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (pasal 1 ayat 1)

LAMPIRAN



Wawancara dengan Kepala Bappeda Kabupaten Kepulauan Selayar



Wawancara dengan Anggota DPRD komisi III Bapak Andi Mahmud



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM PASCASARJANA

KAMPUS TAMALANREA
JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 10 MAKASSAR 90245
TELEPON (0411) 585 024 /FAX (0411) 585 024

Nomor : 1024 /UN4.8.1/PT.01.04/2020
Lamp. : Proposal Penelitian
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

20 Januari 2020

Kepada Yth :
Kepala Biro Otonomi Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan
MAKASSAR

Dengan hormat, kami mohon bantuan Bapak/Ibu kiranya berkenan memberi izin untuk melakukan penelitian kepada mahasiswa Program Pascasarjana Fisip Universitas Hasanuddin yang tersebut di bawah ini :

Nama : **NURUL SHOLEHA**
Nomor Pokok : E052171007
Program : Magister (S2)
Program Studi : Ilmu Politik
Konsentrasi : Politik Lokal
Judul Penelitian : **Konflik Kewenangan Antar Kabupaten Pada Pengelolaan Pulau Kakabia**

Pembimbing : 1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA.
2. Prof. Muhammad, S.I.P., M.Si.

Waktu Penelitian : 20 Januari 2020 - Selesai

Atas izin dan bantuan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi,

Dr. Phil. Sukri, SIP., M.Si

Nip. 197508182008011008 **Tembusan :**

1. Dekan Fisip Unhas, sebagai laporan;
2. Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya Fisip Unhas;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM PASCASARJANA

KAMPUS TAMALANREA
JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 10 MAKASSAR 90245
TELEPON (0411) 585 024 / FAX (0411) 585 024

Nomor : *1024* /UN4.8.1/PT.01.04/2020
Lamp. : Proposal Penelitian
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

20 Januari 2020

Kepada Yth :
Kepala Biro Otonomi Daerah
Provinsi Sulawesi Tenggara
KENDARI

Dengan hormat, kami mohon bantuan Bapak/Ibu kiranya berkenan memberi izin untuk melakukan penelitian kepada mahasiswa Program Pascasarjana Fisip Universitas Hasanuddin yang tersebut di bawah ini :

Nama : **NURUL SHOLEHA**
Nomor Pokok : E052171007
Program : **Magister (S2)**
Program Studi : Ilmu Politik
Konsentrasi : Politik Lokal
Judul Penelitian : **Konflik Kewenangan Antar Kabupaten Pada Pengelolaan Pulau Kakabia**

Pembimbing : 1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA.
2. Prof. Muhammad, S.I.P., M.Si.

Waktu Penelitian : 20 Januari 2020 - Selesai

Atas izin dan bantuan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi,

Dr/ Phil. Sukri, S.I.P., M.Si

Nip. 197508182008011008 **Tembusan :**

1. Dekan Fisip Unhas, sebagai laporan;
2. Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya Fisip Unhas;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM PASCASARJANA

KAMPUS TAMALANREA
JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 10 MAKASSAR 90245
TELEPON (0411) 585 024 /FAX (0411) 585 024

Nomor : 10850 /UN4.8.1/PT.01.04/2019
Lamp. : Proposal Penelitian
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

23 Desember 2019

Kepada Yth :
Gubernur Sulawesi Selatan
c.q. Kepala UPT P2T, BKPM
Provinsi Sulawesi Selatan
MAKASSAR

Dengan hormat, kami mohon bantuan Bapak/Ibu kiranya berkenan memberi izin untuk melakukan penelitian kepada mahasiswa Program Pascasarjana Fisip Universitas Hasanuddin yang tersebut di bawah ini :

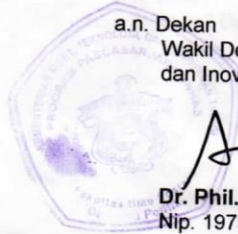
Nama : **NURUL SHOLEHA**
Nomor Pokok : E052171007
Program : Magister (S2)
Program Studi : Ilmu Politik
Konsentrasi : Politik Lokal
Judul Penelitian : **Konflik Kewenangan Antar Kabupaten Pada Pengelolaan Pulau Kakabia**

Pembimbing : 1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA.
2. Prof. Muhammad, S.I.P., M.Si.

Waktu Penelitian : 23 Desember 2019 - Selesai

Atas izin dan bantuan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi,




Dr. Phil. Sukri, SIP., M.Si
Nip. 197508182008011008

Tembusan :

1. Dekan Fisip Unhas, sebagai laporan;
2. Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya Fisip Unhas;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM PASCASARJANA
KAMPUS TAMALANREA
JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 10 MAKASSAR 90245
TELEPON (0411) 585 024 /FAX (0411) 585 024

Nomor : 10850/UN4.8.1/PT.01.04/2019
Lamp. : Proposal Penelitian
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

23 Desember 2019

Kepada Yth :
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sulawesi Tenggara
Kabupaten Buton Selatan

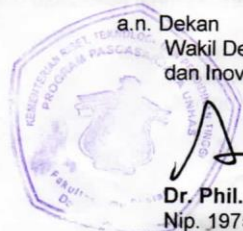
Dengan hormat, kami mohon bantuan Bapak/Ibu kiranya berkenan memberi izin untuk melakukan penelitian kepada mahasiswa Program Pascasarjana Fisip Universitas Hasanuddin yang tersebut di bawah ini :

Nama : **NURUL SHOLEHA**
Nomor Pokok : E052171007
Program : Magister (S2)
Program Studi : Ilmu Politik
Konsentrasi : Politik Lokal
Judul Penelitian : **Konflik Kewenangan Antar Kabupaten Pada Pengelolaan Pulau Kakabia**

Pembimbing : 1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA.
2. Prof. Muhammad, S.I.P., M.Si.

Waktu Penelitian : 23 Desember 2019 - Selesai

Atas izin dan bantuan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.



a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi,


Dr. Phil. Sukri, SIP., M.Si
Nip. 197508182008011008

Tembusan :

1. Dekan Fisip Unhas, sebagai laporan;
2. Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya Fisip Unhas;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPELITBANGDA)
Jl. Jend. Achmad Yani No. 1 Telp. / Fax (0414) 21070.**

**SURAT IZIN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR : 070.5.1/01/1/2020/BAPPELITBANGDA
TENTANG
SURAT IZIN PENELITIAN**

- Dasar :
- Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;
 - Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu, Nomor : 27087 / S.01 / PTSP / 2019, tanggal 30 Desember 2019 Perihal Izin Penelitian.

MEMBERI IZIN :

- Kepada :
Nama : **NURUL SHOLEHA**
NIM : E052171007
Fakultas/Jurusan : FISIP/Ilmu Politik
Pekerjaan : Mahasiswa S2 PPs. Universitas Hasanuddin Makassar
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar.
Tujuan : Mengadakan Penelitian dalam rangka penyusunan Tesis, dengan judul :
" **KONFLIK KEWENANGAN ANTAR KABUPATEN PADA
PENGELOLAAN PULAU KAKABIA** ".

Yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2020 s/d 9 Maret 2020.

Dengan ketentuan :

- Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
- Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
- Menyerahkan 1 (satu) eksemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Kepulauan Selayar Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Benteng
pada tanggal : 6 Januari 2020



Tembusan d.d.h. kepada :

- Bupati Kepulauan Selayar (sebagai laporan), di Benteng;
- Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Selayar, di Benteng;
- Kepala Dinas Kepariwisata Kepulauan Selayar, di Benteng;
- Sekretaris DPRD Kepulauan Selayar, di Benteng;
- Dekan FISIP PPs. Universitas Hasanuddin, di Makassar.



1 2 0 1 9 1 9 1 4 2 1 7 6 1 7

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 27087/S.01/PTSP/2019
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Bupati Kep. Selayar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan FISIP PPs UNHAS Makassar Nomor : 10850/UN4.8.1/PT.01.04/2019 tanggal 23 Desember 2019 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **NURUL SHOLEHA**
Nomor Pokok : E052171007
Program Studi : Ilmu Politik
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S2)
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km. 10, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Tesis, dengan judul :

" KONFLIK KEWENANGAN ANTAR KABUPATEN PADA PENGELOLAAN PULAU KAKABIA "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **01 Januari s/d 03 Maret 2020**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 30 Desember 2019

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



A. M. YAMIN, SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth
1. Dekan FISIP PPs UNHAS Makassar di Makassar;
2. Peringgal.